SKRIPSI

KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI JALAN BUKIT VANMANDRING KABUPATEN BENGKAYANG

Prodi Studi Administrasi Publik
Kajian Manajemen Publik

Disusun Oleh

RAINALDI
E1011211056

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

LEMBAR PERSETUJUAN



LEMBAR PERSETUJUAN

KOORDINASI BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI JALAN BUKIT VANMANDRING KABUPATEN BENGKAYANG

Tanggung Jawab Yuridis Pada

Rainaldi

NIM. E1011211056

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Yulius Yohanes, M.SI

NIP. 196405271992021001

Tanggal 25/8/25

Dosen Pembimbing Pendamping

Martinus, S.Sos, M.AB

NIP. 197212272006041002

Tanggal 25-8-2025

HALAMAN PENGESAHAN



HALAMAN PENGESAHAN

KOORDINASI BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI JALAN BUKIT VANMANDRING KABUPATEN BENGKAYANG

OLEH :
Rainaldi
NIM. E1011211056

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Senin/8 September 2025
Waktu : 09.00 - Selesai
Tempat : Ruang 2.

Tim Penguji

Ketua

Dr. Yulius Yohanes, M.SI
NIP. 197212272006041002

Sekertaris

Martinus, S.Sos, M.AB
NIP. 196405271992021001

Penguji Utama

Dr. H. Arifin, M.AB
NIP. 197212272006041002

Penguji Pendamping

Silverius Tey Seran, S.STP, M.AP.
NIP. 199110022012061003

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ii

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana tanah longsor di Jalan Bukit Vanmandring Kabupaten Bengkayang. Fenomena yang diangkat penulis adalah bahwa Kabupaten Bengkayang merupakan daerah yang sering mengalami bencana tanah longsor, sehingga diperlukan pra bencana sebagai langkah antisipatif melalui upaya mitigasi, yaitu serangkaian kegiatan untuk mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Dalam penelitian ini, digunakan konsep koordinasi yang dimaknai sebagai proses menyelaraskan kegiatan berbagai pihak agar tercapai kesatuan tindakan dalam mitigasi, dengan indikator dari Hasibuan yang mencakup 4 dimensi yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pra bencana antara BPBD, instansi terkait, dan masyarakat telah berjalan sinergis, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta kendala akurasi data laporan akibat miskomunikasi. Secara umum, koordinasi mitigasi pra bencana di Jalan Bukit Vanmandring sudah berjalan efektif melalui sinergi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian tugas, dan disiplin, meski masih terdapat hambatan pada aspek data, sarana, serta respons di wilayah tertentu. Peningkatan efektivitas mitigasi pra bencana dapat dicapai dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, mengoptimalkan komunikasi dan pelaporan, menambah sumber daya serta sarana prasarana, serta memperketat disiplin dan dukungan operasional bagi seluruh instansi terkait.

Kata Kunci : Koordinasi, Mitigasi, Koordinasi Mitigasi Bencana, BPBD Bengkayang, Manajemen Bencana.

ABSTRACT

This research aims to understand and figure out the Regional Disaster Management Agency (BPBD) coordination in landslide mitigation along Bukit Vanmandring Road, Bengkayang Regency. The study highlights the frequent occurrence of landslides in Bengkayang, making pre-disaster efforts crucial as anticipatory measures. Mitigation refers to activities designed to reduce risks before disasters occur. The research applied the concept of coordination as the process of aligning activities among various parties to achieve unified action in mitigation, with Hasibuan's four dimensions as indicators: unity of action, communication, division of labor, and discipline. A descriptive qualitative method was used, with data collected through interviews, observation, and documentation. The findings show that pre-disaster coordination between BPBD, related agencies, and local communities has been synergistic, though challenges remain. These challenges include limited human resources, inadequate facilities, and inaccurate reporting due to miscommunication. Overall, mitigation coordination has been effective, supported by unity of action, communication, division of tasks, and discipline; however, weaknesses still exist in data management, infrastructure, and local responses. Strengthening cross-sectoral coordination, improving communication and reporting, increasing resources and facilities, and tightening discipline are recommended to enhance pre-disaster mitigation effectiveness.

Keywords: Coordination, Mitigation, Disaster Coordination, BPBD Bengkayang, Disaster Management

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian yang berjudul "Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Jalan Bukit Vanmandring, Kabupaten Bengkayang" ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana koordinasi antara BPBD Kabupaten Bengkayang, masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya mitigasi bencana tanah longsor di Jalan Bukit Vanmandring.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan observasi langsung di lokasi rawan longsor, melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, dan mengumpulkan dokumentasi berupa arsip kegiatan serta laporan resmi. Metode ini dipilih agar mampu memperoleh informasi dan gambaran menyeluruh yang mendalam, baik mengenai proses koordinasi, tantangan lapangan, hingga pola kerjasama antara unsur-unsur yang terlibat dalam upaya mitigasi bencana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara BPBD, lintas instansi Pemerintah Daerah, serta masyarakat telah berjalan cukup sinergis. Pihak-pihak terkait yang ikut berperan dalam koordinasi mitigasi antara lain Dinas Kesehatan (DINKES), Dinas Sosial (DINSOS), Dinas Perhubungan (DISHUB), Kepolisian Resor (POLRES), serta Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP). Setiap instansi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendukung upaya percepatan respons bencana.

Sinergi pelaksanaan koordinasi ini terwujud berkat adanya kesatuan tindakan, komunikasi yang efektif, pembagian kerja yang jelas serta disiplin tinggi dari setiap pihak. Kesatuan tindakan terlihat dalam upaya bersama menanggapi setiap potensi maupun kejadian bencana. Komunikasi yang responsif memudahkan proses pertukaran informasi, pemantauan wilayah, hingga penanganan pelaporan masyarakat. Pembagian kerja diatur secara terstruktur sesuai fungsi masing-masing instansi, sehingga pelaksanaan kegiatan mitigasi menjadi lebih terarah dan optimal. Disiplin yang diterapkan dalam setiap unsur tim lapangan juga meningkatkan kesiapsiagaan serta ketepatan waktu respons di lapangan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta kendala keakuratan data laporan bencana dan miskomunikasi antar instansi. Hambatan ini seringkali menyebabkan proses mitigasi belum berjalan maksimal, khususnya saat membutuhkan informasi cepat atau koordinasi bantuan lintas sektor. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan pada aspek pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penambahan sarana prasarana, serta perbaikan sistem komunikasi dan database bersama antar instansi. Penguatan koordinasi menjadi semakin penting mengingat peran aktif setiap unsur, mulai dari BPBD, DINKES, DINSOS, DISHUB, POLRES, SATPOLPP, hingga masyarakat yang bergotong royong dalam upaya pencegahan maupun penanganan bencana.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya koordinasi yang solid, terstruktur, dan berkesinambungan lintas sektor di tingkat daerah agar

mitigasi bencana tanah longsor bisa berjalan lebih efektif dan memberi perlindungan maksimal pada masyarakat di sekitar Jalan Bukit Vanmandring, Kabupaten Bengkayang. Perbaikan dan inovasi pada aspek komunikasi, kapasitas, serta sinergi antarinstansi menjadi kunci agar upaya pengurangan risiko bencana dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rainaldi

Nomor Induk Mahasiswa : E1011211056

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang atau institusi lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam Skripsi ini merupakan rujukan Daftar Pustaka di Skripsi ini.

Pontianak 02 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Rainaldi

NIM. E1011211056

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Jangan buang hari ini dengan mengkhawatirkan hari esok, gunung pun datar Ketika kita sampai ke puncaknya." (Phi Delta Kappan)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, yaitu untuk bapak saya **Mikael** dan ibu saya **Teresia Kornelia Elly** mereka berdua adalah sosok dimana saya bisa menulis skripsi ini dan saya boleh berada sampai dititik ini. Mereka yang selalu percaya pada setiap langkah saya dan menaruh harapan yang baik kepada saya, oleh karena itu terimakasih atas segala semangat, kepercayaan dan doa yang selalu Bapak dan Ibu berikan disetiap langkah kehidupan saya. Sekali lagi terimaksih untuk Bapak dan Ibu saya yang sangat saya sayangi dan saya banggakan.
2. Saudara kandung saya, yaitu **Bang Robby Fadly dan Istri** dan abang ke dua saya **Bang Riksi Oktavianus** yang selalu mensuport segala langkah saya dalam perkuliahan ini. Terimakasih untuk segala Suportnya, baik dalam bentuk motivasi, bantuan fisik berupa dukungan, maupun bantuan materil selama masa perkuliahan saya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya proposal penelitian ini dapat ditulis dan diselesaikan. Adapun judul yang diangkat dari proposal penelitian ini yaitu "Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Bukit Vanmandring". Penulisan proposal penelitian ini ditulis tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari segala pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Dr. Herlan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Yulius Yohanes, M.SI selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis.
3. Martinus, S.Sos, M.AB selaku dosen pembimbing pendamping yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis.
4. Dr. H. Arifin, M.AB selaku penguji pertama saya, yang telah membimbing dan memberi masukan kepada saya pada saat seminar proposal dan pada saat revisi seminar proposal.
5. Silverius Tey Seran, S.STP. M.AP selaku dosen penguji kedua saya yang telah membantu memberikan saya masukan serta yang mengarahkan saya dalam penulisan saya ini mulai dari saya seminar proposal hingga pada saat revisian skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Jurusan Administrasi, Staf Jurusan, Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah cukup membantu dalam proses perkuliahan.
7. Kepada pimpinan dan seluruh staf kepegawaian yang ada di kantor BPBD Kabupaten Bengkayang, saya mengucapkan banyak terimakasih karena telah membantu saya dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada instansi yang berkoordinasi dengan BPBD kabupaten Bengkayang, DINKES, DINSOS, DISHUB, POLRES, SATPOLPP, Kantor Desa Suka Maju, Kantor Desa Pasti Jaya, Kantor Kecaamatan Sungai Betung dan Kecamatan Samalantan yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman perkuliahan maupun teman-teman semasa SMA yang sudah banyak membantu, menjadi teman yang pengertian, dan selalu memberikan energi positif saat saya membuat Praktikum ini.
10. Keluarga besar saya, baik dari pihak Bapak maupun dari pihak mama dan keluarga dari istri abang saya dan dari seluruh anggota keluarga lainnya. Terimakasih sudah memberikan dukungan, semangat dalam saya menyelesaikan kuliah saya.
11. Rekan rekan mahasiswa program studi Administrasi Publik Angkatan 2021, terimakasih telah bersama-sama saling bantu, saling tanya jawab, dan berbagi informasi mengenai perkuliahan demi tujuan yang sama yaitu menyelesaikan perkuliahan ini.

12. Keluarga Besar HIMA-AP, dimana ini adalah tempat saya berkembang dan membangun kemampuan saya dalam berorganisasi, bersosialisasi dan berskesempatan belajar menjadi pemimpin dibeberapa kegiatan. Terimakasih telah mau belajar dan berproses bersama sama, semoga relasi baik yang kita bangun terus berlanjut sampai seterusnya.
13. Sahabat saya, yaitu Teman grup Otw S.Ap dan Pria Ramah yaitu saya, Al Haji, Antar, Aziko, Aqsari, Rival, Ari, Fadel, Amanda, Maria, Yasintha, Elma, Rara, Della. Saya benar-benar tidak bisa bilang cukup terimakasih karena kalian sudah menjadi bagian besar dalam pencapaian ini, dari awal kita sama-sama, perjalanan ini terasa lebih seru dan berarti karena kalian selalu ada untuk saling support. Semoga kita bisa terus berkembang bersama, sukses bersama dan terus selalu saling mendukung satu sama lain. Sekali lagi kalian luar biasa, Terimakasih.

Pada akhir kata, penulis berharap semoga tulisan di proposal penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan pihak-pihak diatas yang telah banyak membantu dalam proses penulisan ini dapat dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Pontianak, 5 Maret 2025

Penulis,

Rainaldi

E1011211056

DAFTAR ISI

halaman

LEMBAR PERSETUJUAN i
ABSTRAK ii
ABSTRACT iv
RINGKASAN SKRIPSI v
PERNYATAAN KEASLIAN viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR LAMPIRAN xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 17
1.3 Fokus Penelitian 17
1.4 Rumusan Masalah 17
1.5 Tujuan Penelitian 17
1.6 Manfaat Penelitian 18
1.6.1 Manfaat Teoritis 18
1.6.2 Manfaat Praktis 18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18
2.1 Teori 18
2.1.1 Pengertian Koordinasi 18
2.1.2 Indikator Koordinasi 22
2.1.3 Tipe-tipe, Sifat dan Manfaat Koordinasi 27
2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi 31
2.1.5 Mitigasi Bencana 32

2.1.6 Pelaksanaan Koordinasi Mitigasi Bencana Tanah Longsor..... 34
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 35
2.3 Alur Pikir..... 38
2.4 Pertanyaan Penelitian..... 39
BAB III METODE PENELITIAN..... 38
3.1 Jenis Penelitian..... 38
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 40
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 41
3.4 Subjek dan Objek Penelitian..... 42
3.4.1 Subjek Penelian..... 42
3.4.2 Objek Penelitian..... 43
3.5 Teknik Pengumpulan Data..... 44
3.5.1 Observasi..... 44
3.5.2 Wawancara..... 45
3.5.3 Dokumentasi 46
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 47
3.7 Analisis Data..... 48
3.7.1 Teknik Analisis Data..... 48
3.7.2 Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)..... 49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 51
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian 51
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkayang 51
4.1.2 Geografis Kabupaten Bengkayang 53
4.2 Gambaran Umum BPBD Kabupaten Bengkayang 57
4.3 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Bengkayang..... 58
4.4 Visi dan Misi..... 58
4.5 Tugas dan Fungsi 59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 90
5.1 Hasil Penelitian 90
5.1.1 Kesatuan Tindakan..... 90
5.1.2 Komunikasi..... 97

51.3 Pembagian Kerja 102
5.1.4 Disiplin 106
BAB VI PENUTUP 111
6.1 Kesimpulan 111
6.2 Saran 113
DAFTAR PUSTAKA 136

DAFTAR TABEL

Tabel *Halaman*

1.1 Spesifikasi Pns Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang Dan Tingkat Pendidikan ... 6
1.2 Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki 7
3.1 Waktu Penelitian 39
4.1 Jumlah Sarana Dan Prasarana yang Dimiliki 89

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

1.1 Peta Bahaya Tanah Longsor Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat 3
1.2 Rekap Laporan Kejadian Bencana 2024 5
1.3 SOP Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten Bengkayang..... 12
1.4 SK Bupati Nomor : 181/BPBD/Tahun 2023..... 14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

1. Pedoman Wawancara……...114
2. Pedoman Observasi……..140
3. Dokumentasi Penelitian……141
4. Biodata Penulis…….....146
5. Surat Tugas Penelitian……..147

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen bencana dapat disusun melalui berbagai tahapan. Salah satu tahapan penting adalah prabencana, di mana rencana aksi mitigasi menjadi salah satu strategi manajemen yang dapat diterapkan. Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilakukan untuk menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pengkoordinasian atau istilah pembimbingan merupakan aktivitas seorang pimpinan dalam memerintah, menugaskan, menjuruskan, mengarahkan, dan menuntun pegawai untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam pembahasan koordinasi, fungsi manajemen biasanya berada pada level operasional dan taktis. Pada level operasional, koordinasi terjadi dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari, di mana berbagai unit atau individu saling berkomunikasi, membagi tugas, dan menjaga disiplin kerja agar proses berjalan lancar sesuai rencana. Sementara itu, di level taktis atau manajerial menengah, fungsi manajemen berfokus pada pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan proses koordinasi antar unit atau instansi yang terlibat, dengan tujuan memastikan kesatuan tindakan melalui pembagian kerja dan alur komunikasi yang efektif.

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan

tertentu. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Menurut Hasibuan (dalam Hasna Asmu dkk. 2018) berpendapat bahwa: "Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi". Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidangbidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Konsep koordinasi mitigasi pra bencana merupakan kerangka kerja yang mengatur keterpaduan berbagai pihak sebelum bencana terjadi, dengan tujuan utama mengurangi risiko dan dampak yang mungkin timbul. Dalam konteks ini, koordinasi dimaknai sebagai proses menyelaraskan peran, tugas, serta sumber daya antar instansi dan komunitas agar tercipta kesatuan tindakan yang efektif dalam menghadapi potensi bencana. Keterpaduan tersebut diwujudkan melalui kesatuan tindakan, komunikasi yang terjalin baik, pembagian kerja yang jelas, serta disiplin dalam pelaksanaan setiap tahap mitigasi pra bencana. Sinergi antar BPBD, instansi terkait, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan langkah-langkah pencegahan berjalan sistematis, mulai dari pemetaan wilayah rawan, sosialisasi, peningkatan kapasitas, penyiapan sarana prasarana, hingga pengawasan pelaporan kondisi lingkungan. Dengan demikian, koordinasi mitigasi pra bencana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelaksana teknis, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan kesiapsiagaan bersama terhadap respon ancaman bencana longsor .

Maka koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut.

Fenomena dalam penelitian ini merujuk pada kejadian nyata atau permasalahan aktual yang terjadi di lapangan dan menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini, fenomena yang diangkat penulis dalam penelitian ini yaitu, Kabupaten Bengkayang merupakan daerah yang sering mengalami bencana tanah longsor, terutama di wilayah dengan kondisi geografis berbukit dan curah hujan tinggi. BPBD sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana memiliki peran penting dalam mitigasi, tetapi koordinasi antar pihak terkait (pemerintah daerah, TNI/Polri, masyarakat, dan lembaga lainnya) masih menghadapi berbagai kendala.

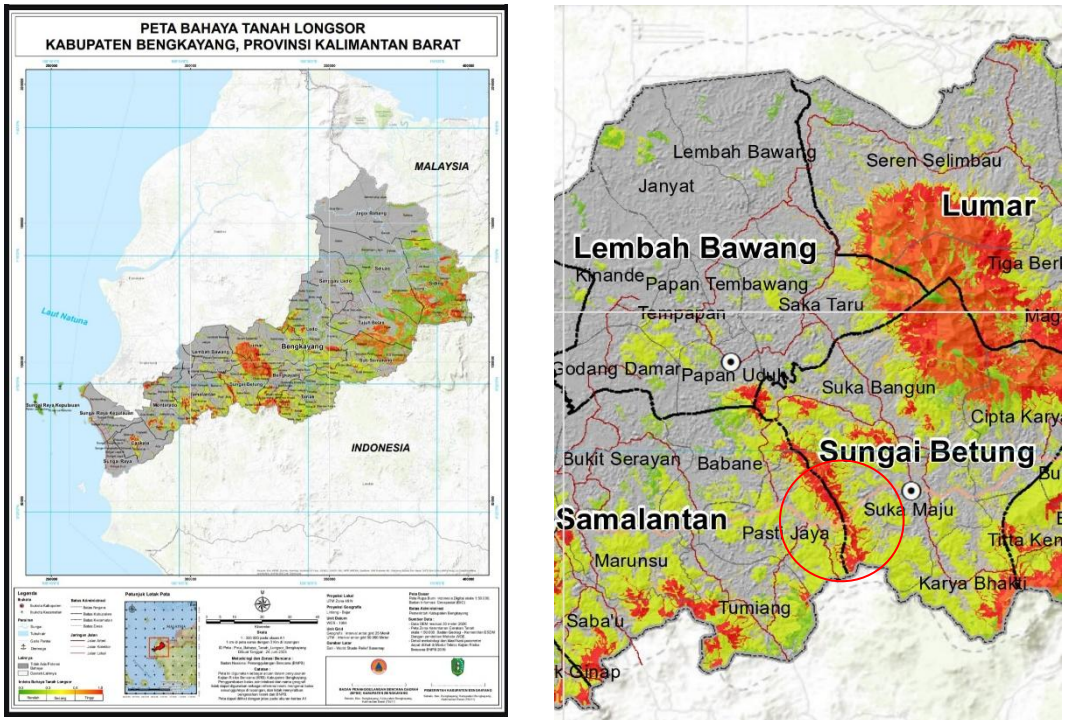
Beberapa fenomena yang bisa menjadi dasar penelitian ini:

1. Frekuensi dan Dampak Longsor

Kabupaten Bengkayang mengalami beberapa kali kejadian tanah longsor yang menghambat akses jalan dan mengancam permukiman warga, terutama di daerah Bukit Vanmandring, serta longsor juga dapat menyebabkan kerugian material dan bahkan korban jiwa.

Gambar 1.1

Peta Bahaya Tanah Longsor Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat



(Sumber: album peta dan matriks tabulasi kajian risiko bencana kabupaten bengkayang provinsi kalimantan barat 2024)

Berdasarkan Peta Bahaya Tanah Longsor Kabupaten Bengkayang tersebut jelaslah bahwa wilayah bukit vanmandring ini terletak pada kawasan dengan tingkat bahaya yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari peta diatas yang menunjukkan bahwa bukit vanmandring yang terletak diantara Desa Pasti Jaya dan Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang memiliki indikator berwarna merah. Bukit Vanmandring merupakan kawasan yang dikenal karena jalan berkelok yang menjadi akses darat penghubung Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan longsor di sekitar Bukit Vanmandring, sehingga akses jalan Bengkayang-Singkawang bisa terganggu. Pada 16 November 2024 sejak pukul 14.00 WIB terjadi hujan deras sampai dengan malam hari menyebabkan longsor, yang hampir melumpuhkan akses jalan tersebut.

Koordinasi horizontal yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat krusial dalam mitigasi risiko bencana, terutama di kawasan rawan tanah longsor seperti Bukit Vanmandring. BPBD berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tanah longsor dan menjaga infrastruktur, seperti jalan penghubung antara Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang, agar tetap aman.

Koordinasi ini melibatkan pengumpulan data mengenai kejadian tanah longsor sebelumnya dan analisis risiko, serta pengembangan strategi mitigasi yang efektif. Dengan pendekatan ini, BPBD berupaya meminimalkan dampak bencana dan melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul akibat cuaca ekstrem di wilayah tersebut.

2. Koordinasi yang Belum Optimal

Belum optimalnya koordinasi antara BPBD, DINKES, DINSOS, DISHUB, POLRES, SATPOLPP, Desa, Kecamatan dan Masyarakat menyebabkan keterlambatan dalam mitigasi dan penanganan bencana. Misalnya, dalam beberapa kejadian, ada beberapa titik longsor dan kayu tumbang diwilayah bukit vanmandring ini yang tidak tertanggapi sehingga masyarakat sendiri yang membersihkan longsor dan kayu tumbang tersebut dengan alat seadanya dan melakukan pungutan liar yang menimbulkan kemacetan di jalur tersebut, informasi peringatan dini yang terlambat dan bantuan yang datang terlambat karena belum optimalnya koordinasi antara instansi tingkat bawah dan pihak yang terdampak.

Contoh lainnya adalah laporan kejadian bencana tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPBD Kabupaten Bengkayang. Laporan tersebut mencatat hanya 1 (satu) kejadian tanah longsor di wilayah bukit Vanmandring, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung. Namun, data yang penulis kumpulkan secara langsung dari lapangan menunjukkan bahwa terdapat 6 (enam) kali kejadian tanah longsor dan kayu tumbang di area tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan pelaporan dan pengawasan, sehingga koordinasi antara masyarakat, instansi tingkat terendah, dan BPBD perlu ditingkatkan untuk mencapai koordinasi yang efektif dalam mitigasi bencana.

Gambar 1.2

Rekap Laporan Kejadian Bencana 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Guna Baru Trans Rangkang
BENGKAYANG

REKAP LAPORAN KEJADIAN BENCANA 2024

No	Tanggal	Lokasi Kejadian Bencana		Jenis Bencana
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	
1.	3 Januari 2024	Bengkayang	Bumi Emas	Banjir
2.	3 Januari 2024	Sungai Betung	Cipta Karya	Tanah Longsor
3.	4 Januari 2024	Bengkayang	Bumi Emas	Banjir
			Sebalo	
			Tirta Kencana	
		Sungai Betung	Suka Maju	
4.	7-9 Januari 2024	Ledo	Lesabela	Banjir
		Suti Semarang	Kiung	
		Sanggau Ledo	Danti	
5.	9 Januari 2024	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	Banjir
6.	25 Januari 2024	Samalantan	Pasti Jaya	Angin Puting Beliung
7.	3 Februari 2024	Jagoi Babang	Sinar Baru	Banjir
8.	5 Maret 2024	Bengkayang	Bumi Emas	Banjir
		Teriak	Sebetung Menyala	Banjir
9.	5 Maret 2024	Bengkayang	Bhakti Mulia	Tanah Longsor
			Sebalo	
			Tirta Kencana	
10.	3 Juni 2024	Siding	Sungkung II	Tanah Longsor
11.	25 Juni 2024	Capkala	Capkala	Tanah Longsor
12.	9 Agustus 2024	Samalantan	Babane	Banjir
13.	12 Agustus 2024	Ledo	Semangat	Banjir



(Sumber: Rekap Laporan Kejadian Bencana 2024 dan Dokumentasi Penulis)

3. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Minimnya alat pendeteksi dini tanah longsor dan keterbatasan peralatan evakuasi menghambat upaya mitigasi. Sumber daya manusia yang terbatas dalam BPBD juga menjadi kendala dalam pelaksanaan koordinasi yang efektif.

Tabel 1.1

Spesifikasi PNS berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang dan Tingkat Pendidikan

No	Pangkat/Gol.Ruang Jumlah PNS	Jumlah PNS						Jumlah
		S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1	-	-	-	-	-	1
3.	Pembina (IV/a)	4	2	-	-	-	-	6
4.	Penata Tk.I (III/d)	-	3	-	1	-	-	4
5.	Penata (III/c)	-	1	-	-	-	-	1
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	2	-	1	-	-	3
7.	Penata Muda (III/a)	-	1	-	2	-	-	3
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-	1	2	-	-	3
9.	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		5	9	1	6	-	-	21

(Sumber: RENSTRA BPBD kabupaten bengkayang tahun 2021-2026)

Secara umum kondisi sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang masih tergolong rendah baik dalam kuantitas maupun kualitas. Jumlah pegawai 21 orang sedangkan jam kerja pada BPBD adalah 24 jam x 7 hari sebagai upaya siaga terhadap kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi. Namun hal ini dapat diatasi dengan adanya dukungan tenaga lapangan dari Relawan yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) sejumlah 6 orang yang mana

tim ini adalah tim langsung dari BPBD yang di danai dengan APBD, dan tenaga pemadam kebakaran sebanyak 21 orang dan tenaga honor yang membantu pekerjaan di Kantor sebanyak 9 orang. Sedangkan secara kualitas kondisi sumber daya manusia pada BPBD Kabupaten Bengkayang masih sangat kurang sebab jumlah tenaga analis kebencanaan seperti geografis dan geologi masih belum tersedia, serta tenaga ahli pemetaan sangat dibutuhkan dalam perencanaan penanggulangan bencana.

Tabel 1.2

Jumlah sarana dan Prasarana yang dimiliki

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Secara Jumlah
1.	Kendaraan roda 6	2 unit	baik	kurang
2.	Kendaraan roda 4	4 unit	baik	kurang
3.	Kendaraan roda 2	9 unit	kurang	kurang
4.	Komputer PC	7 unit	baik	Cukup
5.	Laptop/Note book	12 unit	baik	Cukup
6.	Printer	19 unit	baik	cukup
7.	Tenda	7 unit	baik	kurang
8.	Cain Saw	1 unit	baik	kurang
9.	Radio Komunikasi	1 unit	baik	kurang

(Sumber: Rencana strategis (renstra) BPBD kabupaten bengkayang tahun 2021-2026)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dengan jumlah sarana dan prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang masih belum memadai. Sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Bengkayang masih kurang disebabkan oleh sulitnya akses dan kondisi geografis wilayah, serta kurangnya tenaga ahli dan pelatihan teknis. Selain itu, kurangnya koordinasi antar

instansi dan minimnya evaluasi rutin juga menghambat pengadaan dan pemeliharaan peralatan secara optimal. Kondisi ini membuat BPBD belum mampu memiliki perlengkapan yang lengkap dan memadai sesuai standar nasional, dapat disimpulkan kurang berdasarkan acuan dari Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana yang menetapkan pedoman standar peralatan dan sarana prasarana yang wajib disiapkan oleh instansi terkait sesuai jenis bencananya.

Kurangnya SDM berkualitas dan infrastruktur yang memadai merupakan faktor utama yang menghambat koordinasi, sehingga memperlambat implementasi kebijakan serta pembangunan yang efektif. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, investasi dalam infrastruktur, serta penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor.

4. Perbedaan Kepentingan dan Regulasi

Beberapa kebijakan atau prosedur antar instansi belum sinkron, sehingga menghambat kerja sama dalam mitigasi bencana. Salah satu fenomena di lapangan yang menunjukkan ketidaksinkronan regulasi dan perbedaan kepentingan adalah status Jalan Bukit Vanmandring sebagai jalan provinsi. Hal ini menyebabkan BPBD Bengkayang tidak dapat langsung mengambil tindakan dalam penanganan risiko tanah longsor tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPBD Provinsi. Proses konfirmasi dan koordinasi ini sering kali memperlambat respon penanganan bencana, karena adanya perbedaan regulasi dan prioritas antara tingkat kabupaten dan provinsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa koordinasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan mitigasi bencana, sehingga penelitian ini penting untuk

menganalisis bagaimana koordinasi BPBD dapat ditingkatkan agar mitigasi bencana tanah longsor diwilayah Bukit Vanmandring ini menjadi lebih efektif.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang mempersiapkan pembentukan satuan tugas (Satgas) penanggulangan bencana untuk mempercepat penanganan dampak bencana alam di wilayah tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkayang akan bertindak sebagai koordinator Satgas Gabungan Penanggulangan Bencana Alam, yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi pemerintah terkait. Merespon dari kejadian ini, Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengeluarkan SK Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor : 181/BPBD/TAHUN 2023. Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang, Dwi Berta Meiliani, mengungkapkan bahwa setelah Surat Keputusan (SK) dari Bupati Bengkayang diterbitkan, akan diadakan Apel Satgas Gabungan, serta latihan dan simulasi penanggulangan bencana. Berdasarkan perkiraan, wilayah Kabupaten Bengkayang rawan mengalami banjir hingga Juni 2024. “mereka telah mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait, dan Tim Satgas Gabungan Penanggulangan Bencana Alam di wilayah Kabupaten Bengkayang akan segera dibentuk,” ujarnya, seperti dilansir dari ANTARA, Selasa (9/1/2024).

BPBD Kabupaten Bengkayang, sebagai koordinator, akan mengintegrasikan berbagai unsur dari OPD dan instansi pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana secara terkoordinasi. “Setelah SK Bupati diterbitkan, mereka akan menggelar Apel Satgas Gabungan, diikuti dengan latihan dan simulasi penanganan

bencana alam," tambahnya. Sementara itu, Kepala Polres Bengkayang, AKBP Teguh Nugroho, menyatakan bahwa Polri dan TNI siap membantu pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana. "Kami telah menginstruksikan para kapolsek untuk berkoordinasi dengan Forkopimcam dan kepala desa, guna menentukan lokasi rawan banjir dan longsor, sekaligus menetapkan titik aman untuk pembangunan posko penanggulangan." Langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan dampak bencana di Kabupaten Bengkayang, terutama menghadapi potensi banjir dan longsor yang masih mengancam wilayah tersebut.

Koordinasi mitigasi bencana tanah longsor antara BPBD tingkat kabupaten, BPBD tingkat provinsi dengan instansi terkait seperti PU, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan penanganan bencana yang efektif. BPBD Tingkat kabupaten sebagai koordinator wilayah memulai dengan mengidentifikasi wilayah rawan longsor dan menyusun rencana aksi mitigasi.

Selanjutnya, BPBD tingkat kabupaten berkoordinasi dengan BPBD Tingkat provinsi dan PU untuk melakukan kajian teknis terkait infrastruktur, seperti pembangunan dinding penahan tanah, perbaikan drainase, atau perkuatan lereng di area berisiko.

Bersamaan dengan itu, Dinas Kesehatan dilibatkan untuk menyusun rencana penanganan kesehatan bagi masyarakat terdampak, seperti penyediaan posko kesehatan, layanan medis darurat, dan distribusi obat-obatan.

Gambar 1.3

SOP Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten Bengkayang

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) : PENANGGULANGAN BENCANA

Nomor SOP	: 01 Tahun 2017	Tanggal revisi	: -
Tanggal dibuat	: 22 Agustus 2017	Tanggal berlaku	: 22 Agustus 2017

A. DARAS HUKUM

1. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Mentori Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Reaksi Cepat;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, memuat Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang.

B. KETERKAITAN

1. SOP Pelaksanaan Kaji Cepat Bencana
2. SOP Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana
3. SOP Pelaksanaan Distribusi Logistik Saat Tanggap Darurat Bencana
4. SOP Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

C. PERINGATAN

1. Kesesuaian kejadian dengan laporan dan informasi yang masuk ke Pusdalops;
2. Kesesuaian dengan hasil identifikasi kejadian bencana;
3. Waktu penyampaian laporan tertulis, maksimal 1x24 jam dari kejadian bencana;
4. Memperhatikan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi.

D. KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan alat-alat komunikasi (Radio, HT, Telepon);
2. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer, baik pengolahan data maupun kata;
3. Memiliki kemampuan analisa teknis kerusakan akibat bencana;
4. Memiliki komampuan sarch and rescue (SaR);
5. Memiliki komampuan mengoperasionalkan peralatan rescue;
6. Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor;

E. PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Radio / HT / Telepon;
2. Komputer / Internet;
3. ATK;
4. Kamera / Handycam;
5. Peralatan rescue;
6. Kendaraan rescue.

F. PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Inventarisasi data bencana meliputi: korban bencana, kerusakan, kerugian, kebutuhan;
2. Pengerahan pasukan berupa monitoring lokasi bencana, evakuasi korban bencana, dan bantuan logistik kepada korban bencana.

DISAHKAN OLEH:
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Ir. Yosef, M.Si.
NIP.19620224199603100 1

MEKANISME DAN PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BENGKAYANG

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima informasi masuk dan konfirmasi tentang kejadian bencana.										Radio HT, Telepon, ATK, Komputer	5-10 Menit	Laporan Kejadian Bencana	Pikot Pusdalops siaga 24 Jam
2	Menerima laporan dan menerutukan informasi kejadian kepada pimpinan (Kepala Pelaksana BPBD) segera memerintahkan peaksanaan kaji cepat bencana).										Radio HT, Telepon, ATK, Komputer	5 Menit	Laporan Kejadian Bencana	
3	Melaksanakan kaji cepat bencana untuk menentukan tingkat kerusakan, kerugian, korban dan kebutuhan yang diperlukan untuk menanggulangi bencana.										Radio HT, Telepon, ATK, Komputer, Kendaraan Bermotor	30 Menit	Surat Perintah Tugas	Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan kaji cepat bencana
4	Menyampaikan laporan hasil kaji cepat bencana.										Radio HT, Telepon, ATK, Komputer	5 Menit	Laporan Hasil Kaji Cepat	
5	Memutuskan konsep penanganan bencana dan sintuh bencana.										Hasil Kaji Cepat Bencana, Radio HT, Telepon, ATK, Komputer	10 Menit	Disposisi	
6	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan meminta untuk berkoordinasi dengan BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Instansi terkait menyiapkan perugas, sarana dan logistik yang diperlukan sesuai hasil kaji cepat bencana.										Hasil Kaji Cepat Bencana, Radio HT, Telepon, ATK, Komputer	15 Menit	Disposisi	Instansi teknis terkait: TNI/Polri, Dinsos, Dinkes,RS, PMI, Satpol PP, Dishub, DKP dll
7	Memerintahkan kepada BPBD untuk mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan bencana bersama instansi terkait dan masyarakat.										Radio HT, Telepon, ATK, Komputer	5 Menit	Disposisi	
8	Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan bencana dan mengerahkan pasukan, sarana prasarana dan logistik ke lokasi bencana.										Radio HT, Telepon, ATK, Komputer, Peralatan dan kendaraan rescue, Logistik	10 Menit	Surat Perintah Tugas	Pengerahan pasukan, sarana prasarana, logistik dikoordinir oleh BPBD
9	Melaksanakan evakuasi korban, perbaikan segera sarana prasarana publik vital, dan bantuan logistik kepada korban bencana serta melaporkan pelaksanaan penangaran bencana.										Peralatan dan kendaraan rescue, Logistik	60 Menit	Penanganan bencana dan korban bencana	Penanggulangan bencana dikomandoi oleh BPBD
10	Melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana.										ATK dan Komputer	60 Menit	Laporan	
11	Mendokumentasikan laporan pelaksanaan peanggulangan bencana.										ATK dan Komputer	10 Menit	Laporan terdokumentasi	

Keterangan:
P1 = Petugas Pusdalops
P2 = Rescuer, Tagana, Satgas, Relawan
P3 = Instansi Teknis Terkait
P4 = Tim Reaksi Cepat
P5 = Kepala Sekai Tanggap Darurat
P6 = Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik
P7 = Kepala Pelaksana BPBD
P8 = Sekretaris Daerah (Kepala BPBD)
P9 = (tupati
Bila organisasi tidak ada Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik, maka mekanisme dilaksanakan oleh Kepala Sekai Tanggap Darurat

(Sumber : BPBD Kabupaten Bengkayang)

Dalam koordinasinya BPBD kabupaten bengkayang menggunakan koordinasi multisektoral yaitu, proses penyatuan berbagai sektor yang memiliki peran dan fungsi berbeda untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, koordinasi ini melibatkan berbagai bentuk kerja sama, seperti koordinasi horizontal antar lembaga setara, koordinasi vertikal antar tingkatan hierarki, serta koordinasi fungsional antar elemen yang memiliki fungsi terkait. Dalam hal ini, SATPOLPP dan PMI menggunakan koordinasi melalui *chat WhatsApp* untuk berkoordinasi dan komunikasi cepat, POLRES mengacu pada PERKAP No. 17 Tahun 2009 tentang manajemen penanggulangan bencana dalam koordinasinya, Dinas Kesehatan beracuan pada PERMENKES No. 75 tahun 2019 tentang penanggulangan krisis Kesehatan dan Dinas Perhubungan berkoordinasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di Kabupaten Bengkayang, BPBD berperan sebagai *leading sector* yang memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan berbagai lembaga terkait dalam penanggulangan bencana, Koordinasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan rapat, pelatihan, dan penyesuaian dinamis sesuai kebutuhan serta kondisi di lapangan. Dengan demikian, koordinasi multisektoral di Bengkayang menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah kompleks yang melibatkan banyak pihak dan fungsi berbeda secara efektif dan berkelanjutan guna mengurangi risiko dan dampak bencana.

Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, beberapa pasal mengatur secara sistematis tahapan penanggulangan bencana. Perencanaan penanggulangan bencana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13,

yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana penanggulangan bencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah. Rencana ini mencakup kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi acuan dasar bagi perangkat daerah, termasuk BPBD, dalam menyusun langkah mitigasi bencana tanah longsor. Selanjutnya, Pasal 14 mengatur tentang persyaratan analisis risiko bencana, dimana setiap rencana penanggulangan harus didasarkan pada analisis risiko agar dapat memetakan tingkat ancaman dan kerentanan wilayah, sehingga kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran.

Tahapan berikutnya adalah pengurangan risiko bencana yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18. Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui integrasi ke dalam perencanaan pembangunan, pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan lembaga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi bencana tanah longsor tidak bisa hanya ditangani oleh BPBD, tetapi memerlukan kerja sama lintas sektor. Lebih lanjut, pencegahan bencana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21, yang menekankan pentingnya pengendalian tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi. Pencegahan ini dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat, sehingga dapat mengurangi potensi bencana sebelum terjadi.

Kemudian, Pasal 22 mengatur tentang persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, di mana setiap pembangunan yang berpotensi menimbulkan risiko bencana harus memenuhi standar teknis tertentu, baik dari segi

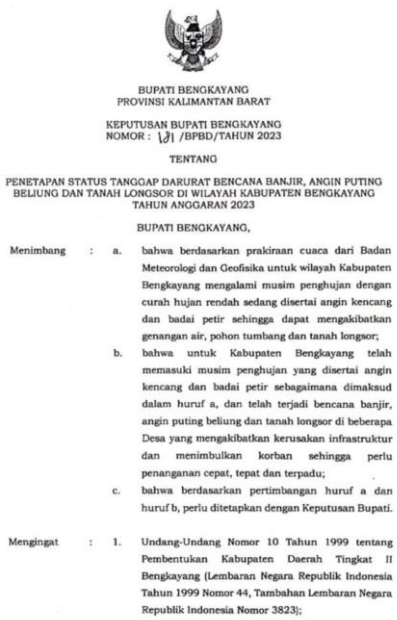
tata ruang, bangunan, prasarana, maupun sarana publik, dengan tujuan menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat. Dengan demikian, rangkaian pasal ini memperlihatkan alur yang jelas: mulai dari perencanaan, analisis risiko, pengurangan risiko, pencegahan, hingga penerapan standar teknis, yang semuanya saling berkaitan dan mendukung upaya koordinasi BPBD Bengkayang dalam mitigasi bencana tanah longsor di Jalan Bukit Vanmandring.Sementara itu, (Pasal 24) Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat bencana daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan status keadaan darurat bencana di wilayahnya. Artinya, jika terjadi bencana seperti tanah longsor di Jalan Bukit Vanmandring, Bupati melalui BPBD dapat menetapkan status darurat sesuai eskalasi ancaman dan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, Perda ini memberikan landasan normatif bahwa koordinasi BPBD dalam mitigasi bencana tanah longsor merupakan amanat peraturan daerah yang harus dijalankan secara terpadu dan berkesinambungan.

Dalam pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana tanah longsor, terdapat sejumlah hambatan yang sering dihadapi di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan regulasi antara BPBD tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran, tenaga ahli, maupun peralatan teknis. Hal ini sering kali menghambat instansi terkait, seperti PU, Dinas Keseh atan, dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk menjalankan tugasnya secara optimal.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana juga menjadi kendala. Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, baik dalam pemeliharaan lingkungan maupun pelaporan potensi bencana, membuat langkah mitigasi kurang efektif. Terakhir, komunikasi yang tidak optimal antarinstansi, baik dalam bentuk kurangnya koordinasi rapat rutin maupun minimnya teknologi pendukung seperti sistem manajemen bencana berbasis digital, turut memperburuk hambatan ini. Semua ini memerlukan upaya bersama untuk meningkatkan sinergi dan efisiensi dalam mitigasi bencana.

Gambar 1.4

SK Bupati Nomor : 181/BPBD/TAHUN 2023



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 181 /BPBD/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG DAN TANAH LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika untuk wilayah Kabupaten Bengkayang mengalami musim penghujan dengan curah hujan rendah sedang disertai angin kencang dan badai petir sehingga dapat mengakibatkan genangan air, pohon tumbang dan tanah longsor;
b. bahwa untuk Kabupaten Bengkayang telah memasuki musim penghujan yang disertai angin kencang dan badai petir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan telah terjadi bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor di beberapa Desa yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan menimbulkan korban sehingga perlu penanganan cepat, tepat dan terpadu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

(Sumber: SK batingsor 2024)

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum optimalnya koordinasi dan penyampaian informasi peringatan dini oleh BPBD Kabupaten Bengkayang terkait potensi tanah longsor di wilayah Bukit Vanmandring.
2. Kesiapsiagaan pada saat terjadi bencana
3. Pelaporan rekap bencana yang belum maksimal
4. Rentan kendali yang ada pada sumber daya manusia

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan di fokuskan pada Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana di jalan Bukit Vanmandring Kabupaten Bengkayang yang belum optimal.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkap, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana koordinasi BPBD Bengkayang dalam mitigasi bencana tanah longsor di jalan Bukit Vanmandring Kabupaten Bengkayang yang belum optimal?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi koordinasi BPBD Bengkayang dalam mitigasi bencana tanah longsor dijalan Bukit Vanmandring Kabupaten Bengkayang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjabaran informasi diatas peneliti mencakup manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dalam bidang manajemen bencana dan memberikan kontribusi berupa referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya pada jurusan admnistrasi publik, serta menambah pemahaman tentang koordinasi mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan di instansi terkait mengenai penanggulangan bencana tanah longsor.

1.6.2 Manfaat Praktis

Terdapat tiga manfaat praktis dalam penelitian ini, manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Terkait

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan bencana tanah longsor. Hasil penelitian ini berpotensi menjadi acuan bagi BPBD, DINKES, DINSOS, DISHUB, POLRES, SATPOLPP, Desa dan Kecamatan dalam melaksanakan mitigasi bencana tanah longsor. Penelitian ini juga bermanfaat untuk pengembangan dan perluasan fungsi koordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan mitigasi bencana dapat menjangkau lebih banyak sumber daya.

2. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pembelajaran kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana, khususnya tanah longsor. Masyarakat menjadi lebih memahami langkah-langkah penanganan bencana tanah longsor melalui edukasi dan sosialisasi. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk siaga bencana tanah longsor.

3. Bagi Peneliti

   Hasil penelitian ini dapat menjadi pengalaman dan pengetahuan tambahan bagi penulis dalam melakukan penelitian mengenai koordinasi suatu instansi dalam menangani kebencanaan, Serta dapat menambah wawasan penulis, khususnya bidang keilmuan administrasi publik dengan fokus kajian manajemem publik.